

1-25-2017

Mekanisme Religio-Politik Pesantren: Mobilisasi Jaringan Hamida dalam Politik Elektoral Tasikmalaya

Sansan Hasanudin

Generasi Madani Tasikmalaya, sansanhasanudin.ui@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs>

Recommended Citation

Hasanudin, Sansan (2017) "Mekanisme Religio-Politik Pesantren: Mobilisasi Jaringan Hamida dalam Politik Elektoral Tasikmalaya," *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*: Vol. 22: No. 1, Article 4.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol22/iss1/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Masyarakat, Jurnal Sosiologi* by an authorized editor of UI Scholars Hub.



Artikel

ISSN : 0852-8489

e- ISSN : 2460-8165

Mekanisme Religio-Politik Pesantren: Mobilisasi Jaringan Hamida dalam Politik Elektoral Tasikmalaya

Penulis: Sansan Hasanudin

Dipublikasikan oleh: *LabSosio*, Pusat Kajian Sosiologi FISIP-UI

Diterima: Desember 2016; Disetujui: Juli 2017

MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi, diterbitkan oleh *LabSosio*, Pusat Kajian Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Jurnal ini menjadi media informasi dan komunikasi dalam rangka pengembangan sosiologi di Indonesia. Redaksi MASYARAKAT mengundang para sosiolog, peminat sosiologi dan para mahasiswa untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif demi pengembangan sosiologi di Indonesia. Untuk kriteria dan panduan penulisan artikel maupun resensi buku, silahkan kunjungi tautan berikut: www.journal.ui.ac.id/mjs

Untuk mengutip artikel ini (ASA Style):

Hasanudin, Sansan. 2017. "Mekanisme Religio-Politik Pesantren: Mobilisasi Jaringan Hamida dalam Politik Elektoral Tasikmalaya." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 22(1):53-80.

SK Dirjen Dikti Akreditasi Jurnal No. 80/DIKTI/Kep/2012

Mekanisme Religio-Politik Pesantren: Mobilisasi Jaringan Hamida dalam Politik Elektoral Tasikmalaya¹

Sansan Hasanudin

Generasi Madani Tasikmalaya

Email: sansanhasanudin.ui@gmail.com

Abstrak

Untuk menjadi pemenang pada kontestasi politik elektoral, para kandidat kepala daerah harus memiliki kekuatan politik yang kuat. Kekuatan politik ini dapat berasal dari berbagai mesin politik, salah satunya adalah institusi pesantren yang memiliki jaringan sosial di dalam masyarakat. Artikel ini mempertanyakan mengapa pesantren dapat menjadi basis massa dalam politik elektoral di suatu daerah dan bagaimana mekanisme keterlibatannya. Konsep religio-politik digunakan untuk melihat keterlibatan pesantren pada politik elektoral dan konsep jaringan sosial sebagai kerangka analisis terhadap mekanisme keterlibatannya. Objek penelitian artikel ini adalah kasus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 dan 2016 di Kabupaten Tasikmalaya karena melihat adanya peran dari jaringan sosial institusi pesantren sebagai kekuatan politik. Penulis berargumen bahwa kemenangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto pada Pilkada tahun 2011 dan 2016 merupakan hasil dari kekuatan politik jaringan sosial pesantren bernama Himpunan Alumni Miftahul Huda (Hamida). Kebaruan konsep artikel ini ialah kekuatan politik dapat berasal dari jaringan informal yang berintegrasi dengan jaringan formal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk artikel ini yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam.

Abstract

To be a winner in the electoral political contestation, the regional head candidates must have a strong political power. This political power could become from a variety of political machines, including boarding institutions (pesantren) which have a social network in the community. This article question is why boarding institutions or pesantren can be a mass base of electoral politics in an area and how the mechanism of involvement. The author used the concept of religio-political to see the involvement of pesantren in electoral politics and the concept of social networks as an analytical framework involvement mechanisms through the local elections in 2011 and 2016 in Tasikmalaya regency as a case study in which author sees the role of social networks pesantren as a political force. The author argues that the victory Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto in the elections of 2011 and 2016 is the result of the political power of social networking pesantren, namely Himpunan Alumni Miftahul Huda (Hamida). The novelty of this article is that the political power could become from informal networks that integrated with formal network. This research data collection techniques are qualitative snowball-depth interview.

Keywords: religio-political; social networks; electoral politics; pesantren; Tasikmalaya

¹Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Asep Suryana, M.Si. yang telah memberi masukan dalam penulisan artikel ini.

PENDAHULUAN

Politik elektoral yang tercermin melalui mekanisme pemilihan umum di Indonesia pada kenyataannya tidak selalu mengandalkan partai politik sebagai instrumen, tetapi hal tersebut juga dilakukan melalui mobilisasi instrumen non politik seperti ketokohan dan jaringan sosial. Pada era tahun 1950-an, misalnya, dinamika politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ketokohan para ulama melalui partai-partai Islam (Feith dalam Nugroho 2011). Begitu pula pada era tahun 1980-an ketika Golongan Karya (Golkar) juga menggunakan kekuatan jaringan sosial dari militer dan birokrasi untuk memenangkan pemilihan umum (Liddle dalam Nugroho 2011). Singkat kata, dinamika politik elektoral di Indonesia tidak hanya melibatkan partai politik saja, tetapi juga instrumen-instrumen nonkepartaian.

Keterlibatan instrumen non-kepartaian ternyata tidak hanya terjadi pada dinamika politik di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara di dunia. Sebut saja negara Thailand yang melakukan kampanye nasional bernama “Thais help Thais” untuk menyelamatkan bangsanya melalui integrasi negara dengan agama Budha (Taylor 2001). Begitu pun di India, keberadaan agama Hindu memberikan filosofi terhadap politik dengan istilah dharma dan moksa (Perrett 1997). Hal serupa terjadi di Inggris dan Wales yang menunjukkan adanya hubungan antara gereja dan negara pada dinamika politik (Beckford 1991). Fenomena demikian memperlihatkan bahwa keterlibatan instrumen nonkepartaian memang dapat terlibat dalam dinamika politik mulai dari tingkat global, nasional, bahkan lokal.

Fenomena keterlibatan instrumen-instrumen non-kepartaian di Indonesia terjadi sampai tingkat lokal. Beberapa contoh kasus di antaranya keterlibatan Pesantren Al-Munawwir dalam politik elektoral tingkat lokal di daerah Yogyakarta pada Pemilihan Umum tahun 2009 (Ernas dan Siregar 2010) dan keterlibatan para tokoh agama (kiai) pada Pemilihan Umum tahun 2004 di Kabupaten Banyumas (Sundari 2005). Dengan demikian, keterlibatan instrumen nonkepartaian pada politik elektoral di Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah.

Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu ilustrasi betapa instrumen nonkepartaian terlibat dalam dinamika politik elektoral. Instrumen nonkepartaian itu direpresentasikan melalui institusi keagamaan (pesantren) di Tasikmalaya bernama Pesantren Miftahul

Huda Tasikmalaya. Melalui pesantren ini instrumen nonkepartaian di Tasikmalaya cenderung diwarnai oleh keterlibatan jaringan sosial Pesantren Miftahul Huda dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tasikmalaya, terutama dalam menyukseskan pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto pada Pilkada 2011 dan 2016 untuk dua kali periode (KPUD Tasikmalaya 2016).

Kajian ilmiah tentang politik elektoral di Tasikmalaya ini menjadi penting karena secara konteks sosial Tasikmalaya dikenal sebagai “Kota Santri” yang memiliki 701 pesantren, 5.003 kiai/ustaz, dan 83.379 santri di wilayahnya (Pemprov Jabar 2015). Komposisi penduduk ini dapat berpotensi menjadi kekuatan besar yang dapat mendukung dinamika politik elektoral dengan mobilisasi jaringan sosial berbasis pesantren yaitu keterlibatan jaringan alumni Pesantren Miftahul Huda pada proses politik elektoral tahun 2011 dan 2016. Hal ini menjadi sangat menarik karena jaringan pesantren yang sejatinya merupakan kader-kader dakwah atau pengemban nilai-nilai keagamaan, pada akhirnya dapat pula bertransformasi menjadi modal politik kandidat kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Dari fenomena politik elektoral tingkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya ini, muncul beberapa pertanyaan yaitu (1) mengapa jaringan alumni pesantren dapat menjadi basis kekuatan pemenang politik elektoral, dan (2) bagaimana mekanisme yang digunakan pesantren untuk masuk ke ranah politik elektoral. Dua pertanyaan penting diajukan untuk mengetahui bagaimana pesantren sebagai lembaga nonkepartaian mampu beradaptasi dalam politik elektoral di Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut menandakan adanya kekuatan informal melalui jaringan sosial para kader/santri pesantren yang terlibat pada politik elektoral tingkat daerah.

Jika melihat berbagai studi kepustakaan, tergambar perbedaan kekuatan politik formal yang berasal dari partai politik dan kekuatan politik informal yang terbentuk dari kekuatan instrumen nonkepartaian. Salah satu studi yang membahas mengenai kekuatan partai politik ialah Gunawan (2013). Ia menyatakan bahwa banyak pejabat di Tasikmalaya yang berasal dari kalangan Islam disebabkan adanya eksistensi gerakan partai-partai Islam yang modern dan terlembaga secara formal, sehingga unsur partai politik juga menjadi pertimbangan penting dalam dinamika politik di Tasikmalaya. Sementara itu, kekuatan politik yang berasal dari instrumen non-kepartaian meliputi peran tokoh agama (kiai) dan media massa.

Begitu pula studi yang dilakukan oleh Nasir (2015) dan Mursyid (2014). Keduanya mengonseptualisasikan bahwa dinamika politik di Kabupaten Tasikmalaya sangat dipengaruhi oleh keberadaan para kiai sebagai tokoh agama. Penelitian yang dilakukan oleh Nasir (2015) menemukan data lapangan bahwa beberapa peran Kiaikiai sangat memengaruhi dinamika politik di Tasikmalaya, mulai dari Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif hingga Pilkada yang terkadang dinyatakan dengan dukungan resmi terhadap salah satu kandidat. Salah satu kiai yang sangat berperan dalam ranah politik di Tasikmalaya² yaitu K. H. Asep M. Affandi yang telah melakukan agenda kampanye politik untuk kemenangan kandidat kepala daerah Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto di dalam Pilkada tahun 2011 (Mursyid 2014). K. H. Asep M. Affandi melakukan kampanye dengan mengedepankan metode “*direct selling*” (penjualan langsung) yaitu melalui sosialisasi di majelis taklim, kegiatan kerohanian Islam, serta menggunakan akses media sosial yang dapat merebut perolehan suara untuk pasangan calon Uu Ruzhanul Ulum–Ade Sugianto khususnya di wilayah Kecamatan Manonjaya Tasikmalaya dan sekitarnya (Mursyid 2014).

Selain peran kiai, Gunawan dan Yuliatwati (2012) menemukan fakta bahwa media massa cetak atau koran juga memengaruhi opini publik dalam menentukan pilihan politik pada Pilkada 2011. Menurut pandangan penulis, Gunawan dan Yuliatwati terlalu tergesa-gesa menyimpulkan hal tersebut dan gagal memahami bagaimana keterpaan media massa terhadap peserta pemilu itu terjadi. Sejauh yang penulis amati sebagai warga Tasikmalaya, koran Harian Kabar Priangan jarang dibaca masyarakat biasa tetapi oleh para tokoh. Secara alur, penulis menganalisis Harian Kabar Priangan yang dibaca tokoh sehingga tokoh dapat menggerakkan massa. Terpaan media massa tidaklah terjadi secara langsung, melainkan melalui tokoh masyarakat yang berperan sebagai aktor penggerak massa.

Penulis sepakat dengan Gunawan (2013), Mursyid (2014), Nasir (2015), dan Gunawan & Yuliatwati (2012) bahwa proses politik elektoral di Tasikmalaya melibatkan partai politik, ketokohan (kiai), dan media massa. Meski demikian, penulis melihat keempat penelitian tersebut

²Tasikmalaya terbagi menjadi dua daerah otonom, yaitu Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Selanjutnya saya menyebutkan Kabupaten Tasikmalaya sebagai “Tasikmalaya”, sedangkan untuk menyebut kota akan disebut “Kota Tasikmalaya”.

tidak membahas keberadaan jaringan sosial alumni pesantren seperti Himpunan Alumni Miftahul Huda (Hamida), sehingga terdapat satu ruang analisis yang belum dipaparkan tentang peran jaringan sosial pada politik elektoral.

Penulis berpandangan bahwa jaringan sosial pesantren yang bernama Hamida menjadi sangat penting dalam dinamika politik elektoral di Tasikmalaya, terutama melalui jejaring yang dibangun oleh para kiai sehingga menjadi kekuatan politik yang signifikan bagi kandidat kepala daerah di Tasikmalaya. Selain itu, penulis berpandangan bahwa jaringan sosial Hamida turut pula menjadi kekuatan basis simpatisan partai politik. Oleh sebab itu, artikel ini ditulis untuk membahas isu kajian dinamika politik Tasikmalaya yang berfokus pada mobilisasi jaringan Hamida dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011 dan 2016.

Terdapat beberapa alasan yang membuat jaringan sosial pesantren menjadi kekuatan politik yang sangat menentukan politik elektoral di Tasikmalaya. *Pertama*, pesantren memiliki legitimasi sosial dari masyarakat Tasikmalaya sehingga mampu mengarahkan para pemilik suara untuk memilih pasangan kandidat bupati-wakil bupati yang “direstui” oleh para tokoh pesantren. *Kedua*, kepiawaian tokoh pesantren untuk melakukan afiliasi dengan beberapa partai politik. *Ketiga*, keberadaan jaringan sosial pesantren menjadi modal sosial yang dapat ditransformasikan menjadi modal politik di dalam kontestasi politik elektoral. Tiga alasan tersebut menjadi argumen penting dalam menguraikan mekanisme religio-politik Pesantren Miftahul Huda melalui mobilisasi jaringan sosial alumni pesantren. Secara konseptual, penulis menguraikan argumentasi tersebut dalam tiga pembabakan analisis mulai dari tingkat makro untuk penguatan argumentasi pertama, tingkat mikro untuk argumentasi kedua, dan tingkat meso untuk argumentasi ketiga.

METODE PENELITIAN

Untuk mengeksplorasi isu dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan data dari informan yang dapat mewakili aktor-aktor yang terdapat dalam jaringan Hamida maupun aktor politik lokal serta melihat fenomena kasus yang terjadi yakni dinamika politik elektoral Tasikmalaya (Bryman 2012). Kriteria informan yang dimaksud adalah

anggota dan pengurus jaringan Hamida dan aktor-aktor lainnya yang berinteraksi dengan jaringan Hamida baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memahami isu dinamika politik Tasikmalaya pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011 dan 2016. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang dengan menggunakan teknik pengumpulan data *snowball* yang dibantu oleh satu orang *gatekeeper* untuk memudahkan penelitian. Fungsi *gatekeeper* diperankan kakak kandung penulis yang sekaligus merupakan bagian dari anggota jaringan Hamida.

Selain menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian yang penulis lakukan juga disertai dengan studi kepustakaan terhadap berbagai sumber seperti buku, jurnal, berita atau publikasi daring, dan publikasi hasil penelitian yang berkaitan dengan topik politik elektoral di Tasikmalaya. Hal ini dilakukan untuk menguatkan argumentasi dan mengontrol validasi data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan.

RELIGIO-POLITIK DAN JARINGAN SOSIAL

Pembahasan mengenai religio-politik tidak akan terlepas dari dua aspek utama, yaitu agama dan politik. Agama yang dipandang sebagai fondasi kehidupan sosial menjadi sangat sakral dan terlepas dari urusan perpolitikan. Asumsi ini terbantahkan dengan adanya fenomena bahwa agama telah mampu mempengaruhi persepsi publik mengenai politik, sehingga muncul konsep religio-politik sebagai wujud keterlibatan agama dalam ranah politik. Secara sederhana, struktur religio-politik dapat didefinisikan sebagai suatu stuktur sosial politik yang berada di dalam suatu masyarakat dan telah terintegrasi ke dalam sistem keagamaan yang berarti agama telah mengintegrasikan dan melegitimasi berbagai sistem sosial yang ada di masyarakat (Ali dalam Suryana 1997).

Pemikiran mengenai religio-politik juga dikemukakan oleh Smith (1985:93-99) yang memaparkan tentang lima ciri religio-politik. *Pertama*, komponen ideologi dari sistem sosial dalam kehidupan sepenuhnya diberikan oleh agama, seperti pandangan bahwa penguasa merupakan wakil tuhan atau setidaknya memiliki sifat-sifat ketuhanan. *Kedua*, elemen-elemen sosial-politik yang diabsahkan secara keagamaan memberikan gambaran bahwa masyarakat politik merupakan satu umat, atau penganut agama yang sama. *Ketiga*, penguasa mempertahankan stabilitas dan kekuasaannya melalui sistem sosial yang sah dan terikat

secara keagamaan, bukan melalui aparat birokrasi yang efisien. *Keempat*, agamawan (ulama) merupakan penasihat penguasa dan berperan mengingatkan masyarakat agar setia kepada penguasa sebagai wakil tuhan. *Kelima*, penguasa memiliki kewenangan yang besar dalam wilayah agama, termasuk berbagai kebijakan kenegaraan yang berhubungan dengan agama.

Poin pertama dari pemikiran Smith (1985) mengenai penguasa/pemimpin ini hampir mirip dengan hasil penelitian Horikoshi (1987) mengenai dua model kepemimpinan sosial yaitu kepemimpinan “simbolik” dan kepemimpinan “administratif”. Model simbolik mengasumsikan bahwa kepemimpinan seseorang didapatkan karena ia menjadi simbol bagi sesuatu yang metafisika, seperti kepemimpinan kiai sebagai tokoh agama. Sementara itu, model administratif menegaskan bahwa kepemimpinan diperoleh karena seseorang memiliki posisi dalam struktur administrasi pemerintahan. Pemikiran ini dihasilkan oleh Horikoshi (1987) melalui studinya mengenai peran kiai Yusuf sebagai pimpinan Pondok Pesantren Cipari, Wanaraja, Garut, Jawa Barat. Namun, konsep religio-politik tidak bisa secara langsung berjalan di suatu masyarakat, sehingga dengan demikian membutuhkan mekanisme tertentu untuk menentukan keterlibatan institusi keagamaan dalam politik elektoral. Hal inilah yang memunculkan ide bahwa institusi keagamaan harus memiliki basis jaringan yang kuat baik di tingkat lokal maupun jaringan yang berskala nasional.

Basis jaringan nasional di Indonesia pada dasarnya didukung oleh beberapa basis sosial seperti alumni universitas negeri, universitas swasta, universitas di luar negeri, lembaga tinggi keagamaan (pesantren), dan lembaga tinggi kedinasan militer, Polri, maupun Kemendagri (Sujatmiko 2014). Keberadaan jaringan nasional ini menjadi kekuatan yang tidak hanya berperan dalam pemersatu bangsa, tetapi juga dalam dinamika politik yang salah satunya melalui jaringan nasional yang terbentuk di beberapa daerah berbasis jaringan pesantren.

Aktor-aktor yang masuk ke jaringan nasional, yang dalam hal ini bisa disebut juga jaringan sosial, akan mendapatkan modal sosial yang dapat diubah menjadi modal politik (Birner dan Wittner dalam Sujatmiko 2014). Hal ini dapat terjadi pula pada jaringan sosial pesantren yang pada awalnya merupakan jaringan keagamaan, tetapi dapat berubah menjadi modal politik ketika salah satu anggota jaringan maju sebagai kandidat kepala daerah. Kasus demikian ditemukan di Tasikmalaya dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011 dan 2016 ketika jaringan keagamaan

yang bernama Hamida berubah menjadi jaringan sosial bersifat politik untuk melakukan berbagai agenda dalam mencapai kesuksesan untuk kemenangan kandidat Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto pada dua periode yaitu 2011-2016 dan 2016-2021.

Pembahasan mengenai teori jaringan sendiri dikemukakan oleh Fukuyama (2002) yang mengatakan bahwa jaringan merupakan hubungan kerja satu orang dengan orang lain yang diikat dengan nilai kepercayaan. Selain itu, jaringan memungkinkan orang-orang mencapai tujuan kelompok jaringan dan mengikat masyarakat secara bersama-sama (Fukuyama 2002:12-13). Dari uraian teori yang dikemukakan oleh Fukuyama (2002), dapat disimpulkan bahwa Hamida dapat dikategorikan sebagai sebuah jaringan sosial yang memiliki hubungan kerja antar sesama anggotanya, bersifat saling mengikat dengan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari sistem kepercayaan, dan memiliki tujuan bersama dalam berbagai agenda kehidupan termasuk politik praktis, sehingga Hamida dapat disebut sebagai kelompok jaringan sosial dengan ciri khas basis sosial pesantren yang bersumber dari institusi agama Islam.

Pembahasan mengenai jaringan sosial sangat berkaitan dengan konsep bonding dan bridging dalam modal sosial. Dua konsep ini memiliki perbedaan tipe jaringan yakni internal dan eksternal (Woolcock dan Narayan 2000:231-232). Dalam buku *Handbook of Social Capital* (Castiglione at al. 2008:59-60), Putnam memaparkan perbedaan antara modal sosial 'ikatan' (*bonding*) dan 'yang menjembatani' (*bridging*), yang mengacu pada konteks relasi sosial masyarakat. *Bonding* merupakan modal sosial eksklusif yang alami, dan berkembang dalam melihat 'ke dalam' (internal) dan kelompok eksklusif orang yang sama seperti ditemukan di gereja-gereja, kelompok pembaca, atau organisasi etnis persaudaraan. Sedangkan hubungan sosial yang berfungsi sebagai 'menjembatani' dari modal sosial yaitu *bridging* yang berada "di luar kelompok" untuk mencari dan menjaring orang di seluruh lapisan sosial masyarakat. Modal sosial tersebut dapat ditemukan, misalnya, di dalam gerakan hak-hak sipil, kelompok pemuda, dan organisasi keagamaan. Dengan demikian, konsep bonding dan bridging ini sangat cocok digunakan untuk menganalisis keberadaan jaringan Hamida sebagai kelompok yang mampu menjalin relasi dalam internal organisasi maupun eksternal.

Konsep *bonding* dalam artikel ini digunakan untuk melihat berbagai cara jaringan Hamida untuk melakukan konsolidasi internal organisasi, sedangkan *bridging* lebih menekankan aspek relasi jaringan Hamida dengan pemangku kepentingan masyarakat non-Hamida, termasuk

pesantren-pesantren yang bukan merupakan cabang dari Pesantren Miftahul Huda dalam menghimpun kekuatan politik sebagai modal berkontestasi dalam Pilkada.

MEKANISME RELIGIO-POLITIK PESANTREN

Mekanisme keterlibatan pesantren di dalam politik elektoral dapat dianalisis pada tingkat makro, mikro, dan meso. Pada tingkat makro, modal utama pesantren dapat memengaruhi dinamika politik elektoral karena institusi agama berbentuk pesantren mendapatkan legitimasi sosial dari masyarakat sebagai lembaga yang terpercaya, baik dari segi ketokohan aktor pesantren maupun sistem pendidikan yang berkualitas. Di tingkat mikro, keterlibatan pesantren dalam politik elektoral ditandai dengan berafiliasinya tokoh-tokoh pesantren terhadap partai politik yang bernuansa Islam. Sementara itu, di tingkat meso, mekanisme keterlibatan pesantren didukung oleh keberadaan basis jaringan sosial yang dimiliki oleh pesantren sebagai modal massa dalam mempengaruhi politik elektoral. Secara konseptual, analisis religio-politik pesantren dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Mekanisme Religio-Politik Pesantren



Sumber: penulis

MEKANISME TINGKAT MAKRO

Pesantren dapat memengaruhi politik elektoral karena lembaga tersebut memiliki legitimasi sosial yang kuat di masyarakat. Legitimasi ini dapat berupa kepercayaan masyarakat terhadap kepribadian tokoh-tokoh pesantren yang berkharisma dan sistem pendidikan pesantren yang berkualitas. Hal inilah yang didapatkan oleh Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya sehingga menjadi pesantren terbesar di Tasikmalaya

dan mampu memengaruhi dinamika politik elektoral dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011 dan 2016.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryana (2000) terdapat dua faktor penyebab Pesantren Miftahul Huda menjadi pesantren terbesar di Tasikmalaya. Faktor pertama, bersifat individual, melalui posisi pendiri pesantren yaitu K.H. Khoer Afandi yang memiliki pengaruh besar di tingkat massa dan sangat diakui memiliki ilmu agama yang tinggi, terutama keahliannya dalam disiplin ilmu tauhid. Faktor kedua bersifat sistem pendidikan pesantren yang memiliki kualitas tinggi dengan diberlakukannya sistem kelas berjenjang yaitu Ibtida (program dasar), Tsanawi (program menengah), dan Ma'hadul Aly (program tinggi) (Suryana 2000).

Di bawah kepemimpinan K.H. Khoer Afandi³, Pesantren Miftahul Huda mengalami perkembangan pesat yang ditunjukkan dengan jumlah santri yang semakin banyak dan berkualitas. Pesantren Miftahul Huda yang berada di Kampung Pasir Panjang, Desa Kali Manggis, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah santri yang cukup banyak berjumlah kurang lebih 2.085 santri (Brata 2013). Selain itu, Pesantren Miftahul Huda banyak menghasilkan para kader penyebaran Islam melalui metode dakwah, sehingga para alumninya banyak yang menjadi pendakwah terkemuka seperti K. H. Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym (Brata 2013).

Sepeninggal K.H. Khoer Affandi, walaupun pengaruh sosial politiknya tidak mampu sebesar ketika sang Kiai masih ada (Nasir 2015). Hal itu terjadi ketika muncul perpecahan dalam internal pesantren terkait afiliasi partai politik, sehingga pengaruh terhadap santri dan masyarakat sekitar pun menjadi terpecah (Nasir 2015). Meskipun demikian, nilai-nilai kharismatik tetap terwariskan kepada para keturunan KH. Khoer Afandi, sehingga masih banyak masyarakat yang menaruh hormat kepada keluarga Pesantren Miftahul Huda.

³K.H. Khoer Affandi dilahirkan di Ciamis pada tanggal 12 September 1923 dan wafat pada tanggal 26 November 1994 di Tasikmalaya. Ia mendirikan Pesantren Miftahul Huda sejak 7 Agustus 1967 di Manonjaya, Tasikmalaya. Perjalanan dakwahnya diwarnai dengan afiliasi gerakan Islam yang cenderung bercorak Nahdatul Ulama (NU)– yang orang sekitar pesantren lebih sering menyebutnya dengan pesantren “salafi” karena mempelajari kitab-kitab kuning, sedangkan mengenai afiliasi politik diketahui bahwa Uwa Ajengan – panggilan kultural KH.Khoer Affandi – kerap menjalin kedekatan dengan Partai Golkar pada masa Orde Baru (Sulasman 2015).

Berbagai bentuk keteladanan dan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh figur-figur kharismatik dari para tokoh pesantren menjadi suatu ukuran dan acuan yang bersifat normatif dalam penyelenggaraan kegiatan pesantren, serta menjadi rujukan utama legitimasi bagi generasi-generasi penerus selanjutnya (Suryana 2000). Alhasil, kiprah Pesantren Miftahul Huda sebagai pesantren terbesar dan berpengaruh di Tasikmalaya masih tetap berkesinambungan hingga saat ini, bahkan dalam memengaruhi dinamika politik elektoral Tasikmalaya.

Para Kiai memiliki pengaruh sosial politik yang cukup kuat terhadap santri serta masyarakat Kota dan Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya (Nasir 2015), terjadi pergeseran fungsi kiai yang awalnya sebagai interpretasi teologi menjadi lebih luas sampai menyentuh kehidupan masyarakat secara umum, termasuk dalam urusan politik (Farid 2001). Klaim ini diperkuat melalui studi Zamakhsary (1982) yang menunjukkan bahwa kebanyakan kiai di Pulau Jawa memang dijadikan sebagai sumber mutlak kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) di lingkungan pesantrennya yang dianggap sebagai “kerajaan kecil”, sehingga tidak heran jika kiai memiliki pengaruh pula pada urusan politik elektoral di kawasan sekitar pesantren.

Beberapa bukti menunjukkan bahwa Pesantren Miftahul Huda memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat. Salah satunya ialah terpilihnya KH. Uu Ruzhanul Ulum sebagai Bupati Tasikmalaya untuk dua kali periode yang secara modal moral karena berasal dari pesantren (wawancara dengan AM, Dewan Pakar DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya, 5 Desember 2016). Selain itu, adik Uu yang bernama Shihabuddin juga terpilih menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan pamannya yakni Asep Maosul Affandi terpilih sebagai anggota DPR RI Nasional (wawancara dengan ASR, Wakil Bendahara Umum DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya, 14 November 2016).

Hal ini menunjukkan bahwa agama telah mengintegrasikan dan melegitimasi berbagai sistem sosial yang ada di masyarakat sesuai konsep religio-politik yang dikemukakan oleh Ali (Suryana 1997). Integrasi agama dan politik ini direpresentasikan dengan terpilihnya tokoh pesantren sebagai pejabat publik yang menandakan bahwa pesantren dapat memengaruhi dinamika politik elektoral karena memiliki modal legitimasi sosial yang kuat di masyarakat.

MEKANISME TINGKAT MESO

Mekanisme keterlibatan pesantren di dalam politik elektoral pada analisis meso didukung oleh keberadaan basis jaringan sosial santri atau alumni pesantren sebagai modal politik. Jumlah santri Pesantren Miftahul Huda yang mencapai 2000 orang setiap periode pembelajaran berpotensi menjadi kekuatan jaringan yang kuat berbasis pesantren.

Sebaran jaringan alumni bernama Hamida ini memang sangat dirasakan di tengah masyarakat, bahkan hampir setiap kelurahan atau satu kampung pasti terdapat alumni Pesantren Miftahul Huda (wawancara dengan MTI, Ketua DPC PKS Kadipaten Tasikmalaya, 23 Juli 2016).

Beberapa peran signifikan dari Hamida dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011 dan 2016 di antaranya dukungan langsung dan kampanye informal. Dukungan langsung dengan memilih pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto menjadi keputusan para anggota Hamida sebagai “tanda terima kasih” kepada guru yang berasal dari institusi pesantren dengan tulus dan ikhlas. Keputusan ini menandakan adanya relasi guru-murid sesuai dengan isi kitab Ta’lim Muta’alim⁴ yang diajarkan di pesantren seperti hasil wawancara berikut:

Kalau masalah untuk mendukung, tidak ditekankan kalau dari pesantren. Tidak ada tekanan, tapi karena kita sebagai alumni, sebagai Hamida merasa kita itu harus berbakti kepada keluarga guru kita, spontan walaupun kita tidak ditekan, walaupun kita tidak diminta untuk mendukung beliau, spontan saja kita mendukung secara tulus ikhlas sajalah gitu lah kalo istilahnya dalam santri. (Wawancara dengan SNM, anggota Hamida/alumni Pesantren Miftahul Huda, 14 Juni 2016)

Fenomena keberadaan jaringan alumni bernama Hamida yang menjadi kekuatan politik ini menegaskan argumentasi bahwa pesantren tidak hanya bergerak dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama, tapi juga bergerak dalam ranah politik. Hal inilah yang menjadi isu kajian

⁴Ta’lim Muta’alim yakni sebuah kitab yang mengajarkan tatakrama dan aturan untuk menghormati guru yang memberikan ilmu, salah satu tatakramanya yaitu berterima kasih. Oleh sebab itu, memilih kandidat kepala daerah yang berstatus guru dan berasal dari pesantren dianggap sebagai bentuk tindakan “berterima kasih”.

religio-politik, yakni adanya keterlibatan institusi agama yang mampu mempengaruhi dinamika politik elektoral. Keterlibatan institusi agama yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Pesantren Miftahul Huda sebagai pesantren yang memiliki legitimasi lebih kuat daripada partai politik di lingkungan masyarakat Tasikmalaya sehingga pesantren dapat mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan kandidat bupati-wakil bupati yang direstui oleh para tokoh pesantren.

Legitimasi sosial ini menjadi pemicu munculnya keterlibatan pesantren dalam politik praktis sebagai wujud dari religio-politik. Secara alur pemikiran, keterlibatan Pesantren Miftahul Huda dalam ranah politik elektoral didukung oleh legitimasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang memercayai institusi pesantren sebagai pedoman penyelenggaraan sistem sosial. Melalui legitimasi ini, para aktor atau tokoh pesantren memiliki kesempatan untuk berkiprah dalam partai politik yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan politik formal (*formal power*), sedangkan para kader pesantren membentuk jaringan Hamida sebagai kekuatan politik informal (*informal power*). Berikut skema alur berpikir mengenai analisa religio-politik Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya.

Gambar 2. Alur Berpikir Analisis Religio-Politik Pesantren Miftahul Huda



Sumber: Kompilasi data wawancara, Juni-Desember 2016

Berdasarkan alur pemikiran tersebut, pencalonan Uu Ruzhanul Ulum sebagai kandidat bupati Tasikmalaya ditopang oleh dua kekuatan politik. *Pertama*, kekuatan politik bersifat formal yang berasal dari instrumen politik berbentuk koalisi partai pengusung karena kiprah

tokoh pesantren pada beberapa partai politik seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua, kekuatan politik informal yang berasal dari basis massa jaringan Hamida sebagai bagian dari alumni Pesantren Miftahul Huda yang terikat secara kultural. Dari dua kekuatan tersebut, Uu Ruzhanul Ulum bahkan dikenal memiliki dua partai yaitu PPP sebagai partai yang “terlihat”, dan Hamida sebagai partai yang “tersembunyi” (wawancara dengan AM, Dewan Pakar DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya, 5 Desember 2016).

Jaringan Hamida dapat dianggap lebih kuat daripada jaringan pesantren lain yang mendukung tujuh calon kepala daerah lainnya pada Pilkada pertama. Hal ini disebabkan Pesantren Miftahul Huda adalah pesantren terbesar di Tasikmalaya yang jaringan alumuanya tetap eksis bergerak melalui pengajian rutin. Selain itu, Uu juga masuk pada kepengurusan Hamida yakni sebagai Ketua Departemen Pendidikan di Hamida Pusat (wawancara dengan KJ, Sekretaris Umum Hamida Pusat, 2 Oktober 2016). Berikut susunan pengurus Hamida Pusat:

- a. Ketua Umum: KH. Jaja Abdul Jabar
- b. Ketua Departemen Pendidikan: KH. Uu Ruzhanul Ulum
- c. Ketua Departemen Dakwah: KH. Nur Kholis Akhyar
- d. Ketua Departemen Ekonomi: KH. Asep Muhammad Tohir
- e. Ketua Departemen Habluminannas/Hamas (Hubungan Masyarakat): KH. Miftah Farid
- f. Ketua Departemen Pendayagunaan dan Organisasi: KH. Aminuddin

Orang-orang yang menduduki jabatan pengurus di Hamida adalah alumni santri Miftahul Huda yang memang telah dipercaya oleh pesantren dan para alumni. Para pengurus ini tidak semua berasal dari keluarga pesantren, tetapi ada pula yang memang alumni biasa. Dalam kepengurusan ini, keluarga pesantren yang terlibat langsung hanya KH. Uu Ruzhanul Ulum dan KH. Miftah Farid (wawancara dengan KJ, Sekretaris Umum Hamida Pusat, 2 Oktober 2016).

MEKANISME TINGKAT MIKRO

Mekanisme religio-politik pesantren di tingkat mikro dilakukan melalui afiliasi tokoh pesantren terhadap partai politik. Beberapa anggota keluarga pesantren secara pribadi masuk menjadi kader partai politik meskipun tidak mengatasnamakan Pesantren Miftahul Huda.

Secara politis, Pesantren Miftahul Huda menjalin interaksi positif dengan dua partai Islam, yaitu PKB dan PPP sebagai partai dominan di Kabupaten Tasikmalaya (wawancara dengan DAH, anggota keluarga Pesantren Miftahul Huda, 2 Oktober 2016).

Salah satu pertimbangan afiliasi terhadap PPP karena partai ini dianggap berbasis Islam dan merupakan parpol yang memiliki posisi dominan di Tasikmalaya. Hal ini dapat dibuktikan melalui statistik perolehan suara pada Pilkada tahun 2006 yang merupakan pemilu pertama kali yang dilaksanakan secara langsung di Tasikmalaya untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Data menunjukkan bahwa pasangan calon bupati-wakil bupati yang pengusung partai politiknya oleh PPP mampu memperoleh suara terbanyak dengan komposisi partai politik seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Komposisi Partai Politik Pengusung dan Persentase Perolehan Suara Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006

Nomor Urut	Pasangan Calon	Jalur/ Pengusung Politik	Persentase Perolehan Suara
1	Tatang Farhatul Hakim-Endang Hidayat	PPP	43,74%
2	Achmad Saleh K-Tetep Abdulatip	PAN, PKS, PBB	22,24%
3	Harun Al-Rasjid - Acep Adang Ruhiat	Partai Golkar, PKB	18,65%
4	Ade Hermawan-Kiswaya	PDI-P	13,37%

Sumber: KPUD Tasikmalaya 2011

Dominasi PPP di Tasikmalaya sangat dipengaruhi oleh peran dari para kiai yang tersebar di berbagai pesantren-pesantren yang berada di wilayah Tasikmalaya (Nasir 2015). Peran para kiai ini sangat berkaitan dengan keterlibatan anggota keluarga Pesantren Miftahul Huda dalam partai politik seperti diwakili K.H. Didi Abdul Hadi, KH. Asep M. Affandi, dan KH. Uu Ruzhanul Ulum pada PPP, sedangkan KH. Abdul Aziz di PKB (wawancara dengan DAH, anggota keluarga Pesantren Miftahul Huda, 2 Oktober 2016).

Tokoh Pesantren Miftahul Huda yang juga merupakan kader PPP di antaranya Uu Ruzhanul Ulum. Tokoh ini memiliki identitas ganda yaitu sebagai anggota keluarga pesantren dan tokoh politik

lokal Tasikmalaya. Dari aspek identitas pesantren, Uu Ruzhanul Ulum merupakan cucu dari pendiri Pesantren Miftahul Huda yaitu KH. Khoer Affandi yang lahir dari Hj. Enung Muthmainnah dengan ayah bernama K. H. Sholeh Nasihin. Sementara itu, dari segi identitas politik, Uu Ruzhanul Ulum mendapatkan pendidikan politik ketika menjadi mahasiswa dengan menjadi kader Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang kemudian dilanjutkan dengan berkarir di PPP hingga saat menjadi bupati Tasikmalaya dua periode yaitu 2011-2016 dan 2016-2021 juga sekaligus sebagai Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat (wawancara dengan AM, Dewan Pakar DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya, 5 Desember 2016).

Kiprah Uu Ruzhanul Ulum pada politik elektoral terlihat saat mengikuti dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang serentak diselenggarakan pada 9 Januari 2011 yang berpasangan dengan Ade Sugianto melalui dukungan dari beberapa partai politik, yaitu PPP, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) (KPU Tasikmalaya 2011). Pasangan ini kemudian menjadi pemenang dengan perolehan suara sebesar 263.099 suara (32,25%) dari total 815.824 suara sah (KPU Tasikmalaya 2011), mengalahkan tujuh pasangan kandidat lainnya.

Tabel 3. Komposisi Jalur/Pengusung Politik dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011

Nomor Urut	Pasangan Calon	Jalur/Pengusung Politik
1	E. Kusnaeni-Suparman	Perseorangan
2	Subarna-Dede T Widarsih	Partai Golkar
3	Endang Hidayat-Ahmad Juhana	Perseorangan
4	Ahmad Saleh-Ucu Asep Dani	Partai Demokrat
5	Harmaen Muchyi-T. Iding Husein	Perseorangan
6	Uu Ruzhanul Ulum - Ade Sugianto	PDIP, PAN, PPP
7	Ade Sumia-Nanang Mamur	Perseorangan
8	E. Hidayat-Asep A. Djaelani	PKS, PKB

Sumber: KPU Tasikmalaya 2011.

Kemenangan yang sama diperoleh pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016. Perolehan suara pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun

2016 memperoleh sebanyak 500.908 pemilih atau sekitar 67,35 persen dari seluruh jumlah hak suara (KPU Tasikmalaya 2016). Sedangkan untuk partai pengusung dalam Pilkada 2016, pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto diusung oleh Partai Golkar, PDIP, PKS, PAN, dan Partai NasDem dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 23 kursi (KPU Tasikmalaya 2016). Pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto ini tidak diusung oleh PPP untuk maju pada Pilkada serentak Kabupaten Tasikmalaya (KPU Tasikmalaya 2016).

Perjalanan Uu memenangkan dua kali Pilkada tidak dapat dikatakan berjalan mudah karena terdapat ketegangan-ketegangan antar aktor politik, baik di dalam partai maupun luar partai. Di dalam internal partai, ketegangan ini dipicu oleh keinginan Ketua DPRD Tasikmalaya yang merupakan fraksi PPP yakni H. Ruhimat untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah, tetapi hal ini tidak terjadi karena kekuatan dukungan kepada Uu lebih besar secara kultural di tubuh partai. Adapun ketegangan di luar partai yaitu dari lawan politik Uu bernama H. Edeng Zainal Abidin yang merupakan mantan Kepala Kantor Agama Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini disinyalir menjadi pemicu adanya “gerakan anti Uu” yang bernama GERATIS (Gerakan Tidak Setuju) yang mengkampanyekan untuk tidak memilih Uu pada periode kedua, atau Golput (Golongan Putih). Namun, Hamida kembali berperan dalam hal penguatan dukungan untuk Uu, yaitu pencerdasan masyarakat agar tidak masuk dalam Golput dan menolak kampanye dilakukan oleh kelompok GERATIS (wawancara dengan MTI, Ketua DPC PKS Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya, 23 Juli 2016).

Pada saat Pilkada kedua (2016), PPP sedang mengalami konflik partai melalui dualisme kepemimpinan di tingkat pusat (Romy versus Djan Faridz), sehingga secara administrasi tidak dapat mengajukan calon kepala daerah. Dalam hal ini, peran Hamida menjadi signifikan karena menjadi wadah konsolidasi massa ketika PPP tidak bisa melakukan hal itu dalam Pilkada kedua. Secara sederhana, Hamida mengambil alih fungsi partai PPP sebagai partai mayoritas warga Tasikmalaya untuk konsolidasi di Pilkada kedua (wawancara dengan AM, Dewan Pakar DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya, 5 Desember 2016).

Kepiawaian Uu Ruzhanul Ulum dalam ranah politik tidak terlepas dari latar belakang pendidikannya sejak kecil yang mengenyam pendidikan pesantren dan pendidikan umum. Pendidikan pesantren didapatkan Uu di lingkungan Pesantren Miftahul Huda, sedangkan pendidikan umum diperolehnya di Universitas Siliwangi (Unsil)

Tasikmalaya jurusan ekonomi (wawancara dengan HM, Anggota Jaringan Hamida, 11 Desember 2016). Penulis berpandangan bahwa Uu mendapatkan sentuhan karakter agama dari lingkungan pesantren, sedangkan kepiawaian dalam berpolitik ia dapatkan melalui pendidikan umumnya di Universitas Siliwangi sebagai mahasiswa ekonomi dan kader KNPI.

Kesuksesan perjalanan karir politik Uu Ruzhanul Ulum yang cukup gemilang juga tidak terlepas dari identitasnya sebagai bagian dari keluarga pesantren dan tokoh politik lokal Tasikmalaya yang memiliki tiga modal utama yakni modal basis massa, modal moral, dan modal materil/karir. Modal basis massa didapatkan Uu Ruzhanul Ulum melalui jaringan alumni pesantren Miftahul Huda yang tersebar di hampir seluruh Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian modal moril didapatkan oleh Uu Ruzhanul Ulum karena memiliki identitas sebagai cucu pendiri Pesantren Miftahul Huda yang memiliki teladan dan berakhlak baik. Sedangkan, modal materil/karir diperoleh Uu Ruzhanul Ulum melalui perjalanan karirnya menjadi kader PPP mulai dari pengurus tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga Provinsi Jawa Barat sebagai Wakil Ketua DPW PPP (wawancara dengan AM, Dewan Pakar DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya, 5 Desember 2016).

Adanya beberapa tokoh pesantren yang berafiliasi dengan partai politik menandakan bahwa hal tersebut merupakan mekanisme religio-politik pesantren. Temuan ini sesuai dengan konsep religio-politik yang dikemukakan oleh Smith (1985) bahwa komponen ideologi dari sistem sosial dalam kehidupan sepenuhnya diberikan oleh agama, dalam hal ini tokoh-tokoh agama. Hal ini juga menegaskan bahwa dua model kepemimpinan yakni “simbolik” dan “administratif” yang dikemukakan oleh Horikoshi (1987) terdapat pada diri Uu Ruzhanul Ulum sebagai pemimpin berkharisma dari pesantren dan pemimpin hasil Pilkada secara administratif.

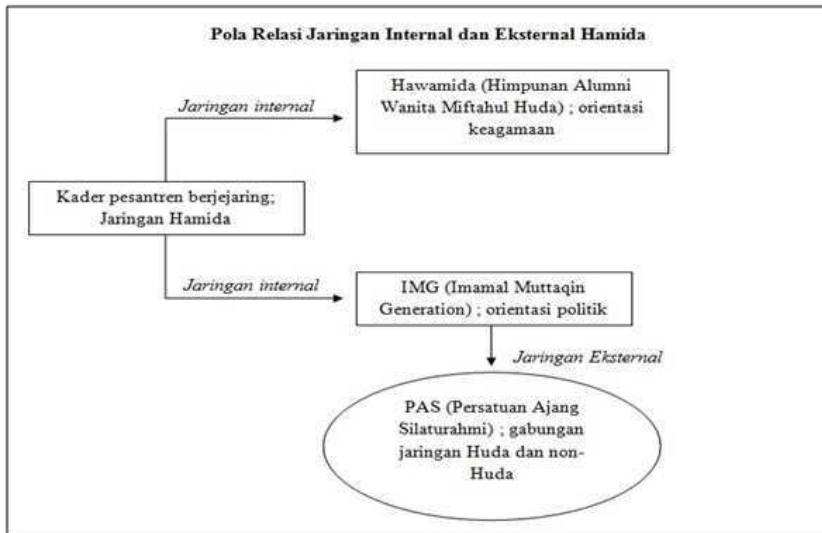
POLA *BONDING* DAN *BRIDGING* DALAM JARINGAN HAMIDA

Hamida berkembang pesat disebabkan oleh konsolidasi internal yang rutin dilakukan oleh para kader dalam bentuk pengajian-pengajian, baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang. Melalui pengajian ini pula, Hamida hadir ke tengah-tengah masyarakat luas yang mengikuti pengajian terbuka untuk umum (tidak hanya untuk Hamida), sehingga

tumbuhlah kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi Hamida. Mengenai isi jaringan sendiri, Hamida ini memang ditujukan untuk mengelola para alumni Miftahul Huda melalui berbagai bidang diantaranya pendidikan, dakwah, ekonomi, dan kemasyarakatan. Pengelolaan ini dilakukan oleh Hamida yang dibantu oleh dua badan otonomnya yakni Hawamida (Himpunan Alumni Wanita Miftahul Huda) dan IMG (Imamal Muttaqin Generation). Selain melibatkan peran alumni dalam konsolidasi dan institusionalisasi jaringan, Hamida juga memiliki agen kunci yaitu kiai sebagai ikon dalam jaringan sosial.

Ikatan yang terjalin melalui jaringan Hamida tersebar ke hampir seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dalam sebarannya, Hamida di Tasikmalaya memiliki 9 (sembilan) koordinator wilayah meliputi Cikatomas, Karangnunggal, Indihiang, Rajapolah-Jamanis, Cibeureum-Tamansari, Manonjaya-Gunung Tanjung, Cineam-Karang Jawa, Cikalong, dan Singaparna-Padi Kembang (wawancara dengan KJ, Sekretaris Umum Hamida Pusat, 2 Oktober 2016). Sembilan koordinator Hamida di Tasikmalaya ini terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Hamida Pusat di Pesantren Miftahul Huda, baik melalui rapat kerja bulanan, pengajian, bahkan kegiatan khusus seperti Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) (wawancara dengan EDF, Ketua Koordinator 4 Tasikmalaya Utara, 15 November 2016).

Penguatan internal dilakukan oleh pengurus Hamida dengan menyelenggarakan berbagai aktivitas jaringan seperti pengajian bulanan, rihlah (rekreasi), dan rapat rutin. Pengajian bulanan dilakukan setiap satu bulan sekali di sekretariat pusat Hamida yaitu Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya. Pelaksanaan pengajian bulanan ini dilakukan pada pekan ke-2 setiap bulan dengan materi pengajian membahas Kitab Al-Hikam, Bidayatul Mujtahid, dan Mukhtarul Hadits. Selain itu, pengurus Hamida mengagendakan rihlah ke berbagai tempat seperti Gunung Galunggung dan Puncak Bogor. (wawancara dengan KJ, Sekretaris Umum Hamida Pusat, 2 Oktober 2016). Untuk rapat bulanan, Hamida melaksanakannya setiap bulan atau ketika ada agenda penting untuk menyusun sebuah program kerja Hamida (wawancara dengan EDF, Ketua Koordinator 4 Tasikmalaya Utara, 15 November 2016).

Gambar 4. Pola *Bonding* dan *Bridging* Jaringan Hamida

Sumber: Kompilasi data wawancara, Juni-Desember 2016.

IMG merupakan badan otonom di bawah Hamida yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antar para alumni Miftahul Huda yang tidak menjadi tokoh pesantren atau kiai. Elemen alumni pesantren yang tergabung dalam IMG didominasi oleh alumni yang berprofesi petani, pengajar, pedagang, pegawai negeri, bahkan politisi (wawancara dengan DAH, anggota keluarga Pesantren Miftahul Huda/Pembina IMG, 2 Oktober 2016). Hal ini dilakukan untuk merangkul setiap elemen alumni Miftahul Huda agar tetap terikat dalam jalinan silaturahmi terhadap pesantren. IMG diharapkan mampu menjadi sarana komunikasi sesama alumni agar aspirasi mereka semakin terakomodasi, tidak hanya para alumni saja yang dipercaya menjadi tokoh pesantren atau kiai, tetapi seluruh santri yang pada perjalanannya menuntut ilmu pernah nyantri di Miftahul Huda. Oleh sebab itu, IMG merupakan bagian penting dari alumni Miftahul Huda (Huda 2014). Keberadaan IMG juga memang tidak hanya dalam rangka membangun komunikasi antar alumni dan pesantren, tetapi juga berguna untuk sumber daya yang dapat bergerak pada bidang politik, budaya, ekonomi (Huda 2014).

HAMIDA DAN PILKADA TASIKMALAYA

Dari berbagai data studi kepustakaan dan hasil penelitian kualitatif didapatkan kesimpulan bahwa calon kandidat Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011 didukung oleh PPP sebagai partai dominan di Tasikmalaya, tetapi tidak didukung saat maju kembali di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016. Meskipun demikian, pasangan ini tetap bisa menang dalam ajang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016, sehingga didapatkan tesis bahwa PPP sebagai partai dominan tidak terlalu menjadi penentu kemenangan pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto, tetapi ada faktor lain selain partai politik yaitu basis sosial pesantren terutama dengan adanya jaringan sosial Hamida sebagai bagian dari kekuatan politik Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto. Artinya, kurang tepat jika kemenangan pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto hanya dilihat karena adanya faktor peran kiai, karena pada kenyataannya kiai “sepuh” yang menjadi Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda sudah wafat tetapi pasangan tetap menang. Terdapat faktor lain yang bersifat sosiologis pada isu ini, yaitu adanya jaringan sosial diantara para santri yang bernama Hamida. Keberadaan jaringan alumni Miftahul Huda yang berasal dari para santri lulusan Pesantren Miftahul Huda menjadi kekuatan politik yang bersifat informal bagi kemenangan kandidat pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.

Dan saya tahu persis itu, bahwa yang mendukungnya itu Hamida, dan saya tahu persis yang Bergeraknya itu Hamida... Hamida. Sebetulnya partai itu hanya, eh...sebagai kendaraannya saja, justru yang Bergeraknya itu Hamida. Biasanya kalau di pesantren itu *sami'na wa'ato'na* (taat), bukan *sami'na wa fikir fikir heula* (kritis). (Wawancara dengan MTI, Ketua DPC PKS Kadipaten Tasikmalaya, 23 Juli 2016).

Metode yang dilakukan oleh alumni yang tergabung dalam Hamida diantaranya yaitu *direct selling* (penjualan langsung) kandidat. Metode kampanye ini dilakukan pada majelis ta'lim dan pengajian yang dipimpin oleh para anggota Hamida yang tersebar di seluruh pesantren-pesantren Kabupaten Tasikmalaya. Adapun kampanye informal dilakukan dengan cara membagikan stiker atau kalender yang berlabel Hamida sebagai bagian dari “tanda” agar masyarakat memilih

pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011 dan 2016.

Ya kalau dari Hamida buat stiker, buat spanduk ada lah yang seperti itu. Tapi tidak gembar-gembor (terang-terangan) gitu, ya sekedarnya lah. Kan setiap Hamida itu pasti mempunyai majelis di tempatnya masing-masing, otomatis mempunyai majelis kan mempunyai massa, mempunyai massa. Setiap Hamida itu kan mempunyai massa masing-masing. Sedikitnya kita akan mendukung beliau itu, minimal kalau kita sebagai Hamida membuat kalender, atau membuat stiker dan kita bagikan kepada anggota majelis yang ada di tempat Hamida masing-masing. (Wawancara dengan SNM, anggota Hamida/alumni Miftahul Huda, 14 Juni 2016)

Hal ini menegaskan bahwa pesantren memiliki modal massa yang dapat ditransformasikan menjadi modal politik di dalam kontestasi politik elektoral. Kondisi ini karena kandidat Bupati atas nama Uu Ruzhanul Ulum merupakan bagian dari lingkungan pesantren yang memiliki basis massa dan jaringan di hampir seluruh wilayah Tasikmalaya melalui jaringan Hamida.

Adanya jaringan sosial berbasis pesantren bernama Hamida di Kabupaten Tasikmalaya menjadi kekuatan jaringan informal bagi pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto. Namun demikian, kekuatan jaringan Hamida tidak hanya berhenti pada Pilkada saja, tetapi juga dapat dioptimalkan dalam menyukseskan program pemerintah diantaranya program Gerbang Desa (Gerakan Bangun Desa), Ajengan Masuk Sekolah (AMS), dan Maghrib Mengaji (Pembkab Tasikmalaya 2014). Tentu saran ini pun diperkuat argumentasi sebagian kecil anggota jaringan Hamida memilih Uu-Ade di Pilkada kedua karena memang memiliki motivasi agar mendapatkan prioritas pembangunan (wawancara dengan SNM, anggota Hamida/alumni Pesantren Miftahul Huda, 14 Juni 2016).

Jaringan Hamida dapat menjadi aktor pelaksana program Gerbang Desa dari sisi *civil society*. Anggota jaringan informal Hamida dapat berpartisipasi mulai dari penyampaian aspirasi sampai dengan pelaksanaan program. Salah satu cara penyampaian aspirasi dan saran yaitu melalui kanal daring (*online*) pada www.gerbangdesa.com (Pembkab Tasikmalaya 2014). Pada tahap pelaksanaan, anggota jaringan Hamida dapat terjun langsung dalam berbagai proyek pemberdayaan

dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan di Tasikmalaya. Selain itu, jaringan Hamida juga dapat menjadi aktor utama dalam menerapkan Program Tasikmalaya Kota Al-Quran sebagai representasi kultur Tasikmalaya sebagai Kota Santri yang sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami (Pemkab Tasikmalaya 2014).

KESIMPULAN

Pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto menjadi pemenang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011 dan 2016 bukan hanya karena faktor kekuatan partai politik pengusung saja tetapi juga karena memiliki basis sosial jaringan Hamida. Fenomena ini menandakan bahwa keberadaan Hamida sangat signifikan dalam mempengaruhi dinamika politik di Tasikmalaya. Hamida menjadi kekuatan politik pasangan calon yang akan maju pada Pilkada, termasuk pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto. Sedangkan partai politik pengusung hanya menjadi “kendaraan politik” calon kandidat Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto untuk menjadi bupati-wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dalam dua periode yaitu periode 2011-2016 dan 2016-2021.

Fenomena keberadaan jaringan alumni bernama Hamida yang menjadi kekuatan politik ini menegaskan argumen bahwa pesantren tidak hanya bergerak dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama, tapi juga bergerak dalam ranah politik ketika telah memiliki legitimasi dari masyarakat. Selain itu, pesantren yang masuk ke ranah politik elektoral memiliki mekanisme keterlibatan berupa afiliasi terhadap partai politik dan harus memiliki modal massa yang dapat ditransformasikan menjadi modal politik di dalam kontestasi politik elektoral.

Secara teoritis didapatkan kesimpulan bahwa sebuah jaringan sosial akan berpotensi menjadi modal politik ketika salah seorang anggota jaringan masuk pada ranah politik praktis. Fenomena ini dicontohkan oleh Uu Ruzhanul Ulum sebagai bagian dari jaringan Hamida yang menjadi kandidat kepala daerah di Tasikmalaya dengan masuk sebagai kader PPP. Modal politik yang berasal dari adanya jaringan ini dapat disebut dengan istilah “kekuatan informal” (*informal power*). Sedangkan, konsep kekuatan politik yang berasal dari partai politik dapat disebut dengan istilah “kekuatan formal” (*formal power*). Analisis

terhadap realitas seperti itu menghasilkan konsep mengenai kekuatan politik yang terbagi menjadi dua jenis yaitu kekuatan informal dan kekuatan formal yang pada dasarnya berasal dari jaringan informal berupa basis massa dan jaringan formal berbentuk partai politik.

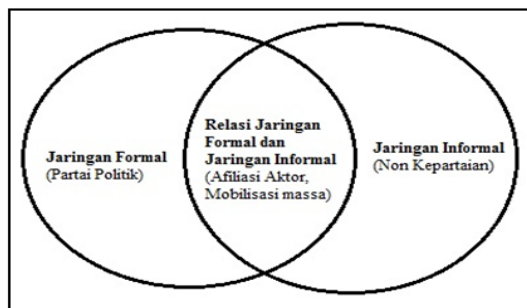
Tabel 4. Pola Tipologi Kekuatan Politik

Kekuatan Politik	Tipologi Jaringan	Basis Sosial
Kekuatan Formal (<i>formal power</i>)	Jaringan Formal	Partai Politik/institusi politik pemerintahan
Kekuatan Informal (<i>Informal Power</i>)	Jaringan Informal	Organisasi Masyarakat/non kepartaian

Sumber: Penulis

Jika mengacu pada tipologi kekuatan politik di atas, jaringan Hamida dapat dikategorikan sebagai jaringan informal organisasi masyarakat yang memiliki basis sosial keagamaan yaitu pesantren. Jaringan informal Hamida dalam Pilkada baik tahun 2011 maupun 2016 di Kabupaten Tasikmalaya ini menjadi kekuatan politik yang sangat berpengaruh melebihi kekuatan partai-partai politik pengusung. Jaringan informal memiliki pengaruh yang lebih besar daripada jaringan formal pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun demikian, jaringan informal tetap melakukan relasi dengan jaringan formal dalam membangun kekuatan politik yang kuat. Relasi tersebut dapat digambarkan seperti ilustrasi berikut.

Gambar 5. Pola Relasi Jaringan Formal dan Informal Pada Politik



Sumber: penulis

Ilustrasi di atas menjadi kebaruan konsep dari artikel ini mengenai adanya relasi antara jaringan formal dan informal dalam membangun kekuatan politik. Relasi yang terbentuk diantara kedua jaringan

ini dilakukan dengan mekanisme afiliasi aktor-aktor jaringan dan mobilisasi massa. Aktor jaringan memiliki peran mekanisme pada tingkat mikro, sedangkan mobilisasi massa bergerak di tingkat meso. Analisis mikro dan meso ini menjadi pelengkap bagi konsep religio-politik Smith (1985) yang hanya melihat fenomena pada tingkat makro.

DAFTAR PUSTAKA

- Beckford, James A. 1991. "Politics and Religion in England and Wales." *Jurnal Daedalus: Religion and Politics* 120(3):179-201.
- Brata, Yat Rospia. 2013. "Sejarah Berdirinya Pesantren Miftahul Huda Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal Artepak* 1(1):50-68.
- Bryman, A. 2012. *Social Research Methods*. Edisi IV. New York: Oxford University Press.
- Castiglione, Van Deth, dan Wolleb. 2008. *Handbook of Social Capital*. Oxford University Press.
- Dhotfier, Zamakhsary. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Ernas, S. & Siregar, Ferry, M. 2010. "Dampak Keterlibatan Pesantren Dalam Politik: Studi Kasus Pesantren di Yogyakarta." *Jurnal Kontekstualita* 25(2):195-224.
- Farid, Miftah. 2001. "Kiai Diantara Peran Agama dan Partisipasi Politik: Dilema Sejarah dan Pencarian Identitas." *Jurnal Mimbar Pendidikan* 20(4):21-26.
- Fukuyama, F. 2002. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Gunawan, Hendra. 2013. "Habitus Politik Gerakan Islam Modern di Tasikmalaya." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 1(2):217-226.
- Gunawan, H, & Yuliawati, F. 2012. "Pers dan Politik: Studi Terhadap Peran Harian Priangan Kota Tasikmalaya Dalam Komunikasi Politik." *Jurnal Aliansi: Jurnal Politik dan Pemerintahan* 4(1):594-607.
- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: PSM.

- Huda, Miftahul. 2014. *Generasi Imamal Muttaqin (Imamal Muttaqin Generation/IMG)*. Tasikmalaya. Diakses dari <http://www.miftahul-huda.com/alumni/mh-img/item/139-asal-usul-img>
- KPUD Tasikmalaya. 2011. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Tasikmalaya: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya. Diakses dari <http://kpud-tasikmalayakab.go.id/pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kabupaten-tasikmalaya/>.
- KPUD Tasikmalaya. 2016. Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2016-2021. Tasikmalaya: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya. Diakses dari <http://kpud-tasikmalayakab.go.id/2016/01/19/penetapan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-terpilih-periode-2016-2021/>.
- Loket Peta. 2016. *Peta Kabupaten Tasikmalaya*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Diakses dari <http://loketpeta.pu.go.id/peta-kabupaten-tasikmalaya-50000>.
- Mursyid, Faisal. 2014. *Peran Kiai Dalam Pemasaran Politik: Studi Kasus Peran Kiai Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Dalam Pemenangan Calon Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Nasir, Nurlatipah. 2015. "Kiai dan Islam Dalam Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Kota Tasikmalaya." *Jurnal Politik Profetik* 6(2):26-49.
- Nugroho, Kris. 2011. "Ikhtiar Teoritik Mengkaji Peran Partai dalam Mobilisasi Politik Elektoral." *Jurnal Universitas Airlangga* 24(3):202-214.
- Pemkab Tasikmalaya. 2014. *Gerbang Desa*. Tasikmalaya: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya. Diakses dari <http://www.tasikmalayakab.go.id/index.php/2014-06-13-06-21-23/2014-06-13-06-22-48/gerbang-desa>.
- Pemkab Tasikmalaya. 2014. *Profil Daerah: Visi dan Misi*. Tasikmalaya: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya. Diakses dari <http://www.tasikmalayakab.go.id/index.php/selayang-pandang/profil-daerah/visi-dan-misi>.
- Pemprov Jawa Barat. 2015. *Jawa Barat Dalam Angka 2015*. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Perrett, Roy W. 1997. "Religion and Politics in India: Some Philosophical Perspectives." *Religious Studies* 33(1):1-14.

- Smith, Donald Eugene. 1985. *Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis*. Terj. Machnun Husein. Jakarta: Rajawali Press.
- Sujatmiko, Iwan Gardono. 2014. "Keterwakilan Etnis di Politik Nasional: Kasus Etnis Sunda di Republik Indonesia." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 19(1):1-26.
- Sulasman. 2015. "Peaceful Jihad dan Pendidikan Deradikalisasi Agama." *Jurnal Walisongo* 23(1):151-176.
- Sundari, Tri. 2005. *Peran Politik Kiai di Pedesaan (Studi Kasus di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Suryana, Asep. 1997. *Pola Adaptasi Sosio-Politik Pesantren: Studi Kasus Pesantren Miftah Tasikmalaya*. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suryana, Asep. 2000. "Alih Generasi dan Rutinisasi Kharisma: Kasus Pesantren Miftah, Tasikmalaya." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 7:51-63.
- Taylor, J. L. 2001. "Embodiment, Nation, and Religiopolitics in Thailand." *South East Asia Research* 9(2):129-147.
- Woolcock, M. dan Narayan, D. 2000. "Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy." *World Bank Research Observer* 15(2):225-250.